

KELOMPOK MARGINAL DAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA INDRAMAYU TAHUN 2020 (STUDI KASUS PILKADA INKLUSIF DI KABUPATEN INDRAMAYU)

oleh

Dede Irawan¹, Muh. Aripin Nurmantoro²

¹ Democracy Electoral Emproment and Partnership (DEEP), Jakarta

² Staf Bawaslu Kabupaten Indramayu, Indramayu

Email: dedeirawan141@yahoo.co.id, aripin.nurmantoro@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian ini menjelaskan keterlibatan kelompok marginal dan partisipasi pemilih pada pilkada indramayu tahun 2020, penelitian tersebut menggunakan metode qualitative deskriptif dengan pendekatan studi kasus bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pilkada inklusif di kabupaten indramayu, apakah sudah menyentuh kelompok masyarakat marginal secara keseluruhan atau belum, karena selama ini kelompok masyarakat marginal yang berpotensi rentan tidak memberikan hak politik dalam proses pilkada sehingga perlu dilakukan kajian penelitian secara komprehensif. Adapun proses pengambilan data dalam penelitian ini dengan cara mengkomparasikan kegiatan sosialisasi pilkada indramayu tahun 2020, Tingkat Partisipasi masyarakat dan metode Pendidikan pemilih yang dilakukan selama proses tahapan Pilkada, Adapun hasil peneilitian menunjukan bahwa secara umum pelibatan kelompok masyarakat marginal baru pada klaster masyarakat binaan di Lapas kelas II Indramayu belum menyentuh secara keseluruhan kelompok masyarakat marginal, selain itu juga kelompok maringal belum menjadi mitra strategis untuk Pendidikan pemilih secara berkelanjutan dan keberadaan program relawan demokrasi belum dimanfaatkan untuk mengakomodir kelomok masyarakat marginal masuk dan berperan aktif sebagai agen mentor sosialisasi pemeli di masyarakat, program tersebut juga cenderung kurang memephrhatikan 11 basis pemilih sehingga upaya peningkatan partisipasi pada pilkada masih belum maksimal. Sedangkan pola sosialisasi pemilu yang dilakukan KPUD bersifat regular dan belum mengkombinasikan dengan dinamika sosial masyarakat serta sebaran data partisipasi pemilih dalam setiap momentum pemilu dan pilkada, dimana sebaran data partisipasi masyarakat tersebut dapat dijadikan acuan untuk melakukan intervensi program peningkatan partisipasi pemilih.

Kata Kunci: *Kelompok Marginal, Partisipasi Pemilih, Pilkada*

Abstract

Abstract: This study describes the involvement of marginalized groups and voter participation in the 2020 of regional head election, the study uses a descriptive qualitative method with a case study approach. So far, marginalized groups of people who are potentially vulnerable do not provide political rights in the process of regional head election, so it is necessary to conduct a comprehensive research study. The data collection process in this study was carried out by comparing the Indramayu election socialization activities in 2020, the level of community participation and voter education methods carried out during the process of regional head election, the marginal groups has been taouched as a target socialization just the community in penitentiary of class II Indramayu, it has not fully touched marginal community groups, besides that the marginalized groups have not become strategic partners for sustainable voter education and the existence of the democracy volunteer program has not been utilized to accommodate marginalized community groups to enter and play an active role as agents of mentor socialization of buyers in the community, program This also tends to pay less attention to the 11 voter bases so that efforts to increase participation in the regional elections are still not optimal. Meanwhile, the election socialization pattern carried out by the KPUD is regular and has not combined with the social dynamics of the community and the distribution of voter participation data in every election and regional election momentum, where the distribution of community participation data can be used as a reference for intervention programs to increase voter

participation.

Keywords: *Marginal Groups, Voter Participation, regional head election*

PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemilu paska reformasi 1999 yang telah memberikan keterbukaan bagi masyarakat luas untuk ikut serta secara aktif dalam proses pemilu merupakan bentuk kemajuan sistem demokrasi di Indonesia yang bertujuan memberikan akses kepada masyarakat terlibat langsung dalam pembangunan, selain itu juga masyarakat dapat ikut serta mengontrol kebijakan dan program pemerintah melalui beberapa cara yang diatur oleh undang-undang termasuk juga dengan menggunakan cara konstitusional seperti pemilu dan pilkada. Pemilu secara umum adalah sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu negara yang menganut azas demokrasi yang memberi kesempatan berpartisipasi politik bagi warga negara untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi mereka. (Jayus, 2013) menjelaskan bahwa Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan sedangkan dalam (UU No 7 Tahun 2017, 2017) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017, pemilu memiliki enam asas penting yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pemilu adalah partisipasi pemilih, karena secara langsung tingkat partisipasi merupakan cerminan kesadaran politik masyarakat, keberhasilan pendidikan politik serta tercapainya konsolidasi demokrasi, menurut ramlan surbakti yang dijelaskan oleh (Arniti, 2020) menjelaskan bahwa partisipasi politik terbagi menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan-kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah, Hal tersebut juga pernah dipaparkan oleh (Subekti, 2014) dalam jurnal Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013) Yang menjelaskan bahwa kegiatan partisipasi politik bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, serta efektif atau tidak. Partisipasi politik bisa diartikan sebagai peran warga negara dalam proses pemerintahan, Adapun bentuk partisipasi ini dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan dan berpengaruh bagi kehidupan masyarakat suatu negara. Dalam konteks pemilu partisipasi politik juga dapat dikonversikan sebagai upaya masyarakat dalam memberikan hak suara pada pelaksanaan pemilu dan/atau pilkada. Melihat penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi pemilih merupakan hal yang sangat penting dalam sistem demokrasi electoral saat ini, karena tanpa adanya partisipasi dalam pemilu dan/atau pilkada mengindikasikan bahwa proses pemilu dan/atau pilkada dapat dianggap kurang berhasil sehingga pihak-pihak terkait dalam hal ini Komisi Pemilihan umum dan *stakeholder* lainnya berupaya untuk melakukan sosialisasi tahapan pemilu dan/atau pilkada dengan harapan dapat mendorong partisipasi pemilih dan menumbuhkan kesadaran politik di masyarakat, upaya tersebut dilakukan di setiap daerah termasuk di Kabupaten Indramayu, adapun tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Indramayu yang bersumber dari web resmi KPU Kabupaten Indramayu antara lain : (a). Pada pilkada 2015 sekitar 63 %, (b). Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2018 sekitar 58,2 %, (c). Pemilihan umum 2019 mencapai 72% dan (d). Pilkada Indramayu tahun 2020 sekitar 66 %. Melihat sebaran partisipasi pemilih pada pemilu dan pilkada di Kabupaten Indramayu sangat fluktuatif dan ada kecenderungan trend partisipasi yang berbeda antara pemilu dan pilkada, hal tersebut menunjukkan bahwa dinamika partisipasi pemilih menjadi hal yang sangat penting untuk suksesi perhelatan pemilu dan/atau

pilkada di setiap daerah, secara garis besar metode sosialisasi dan pendidikan pemilih harus inovatif dan inklusif menasar kelompok-kelompok masyarakat tertentu seperti misalnya : para buruh tani, nelayan, perempuan, pengemudi ojek online, kelompok disabilitas dan kelompok marjinal lainnya. Selama ini kelompok marjinal sangat apatis terhadap pemilu karena anggapan bahwa adanya pemilu ataupun pilkada belum dapat merubah nasib para kelompok marginal itu sendiri, demokrasi yang seharusnya menjadi jalan utama penampungan aspirasi politik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bawah seolah-olah tidak hadir sehingga kelompok marginal tersebut rentan apatis terhadap pemilu, faktor inilah yang tanpa disadari juga sebagai salah satu indikator maraknya praktek praktek jual beli suara atau *money politic* karena harapan dan ekspektasi kebutuhan masyarakat akan program program pemerintah yang belum terealisasi, kelompok marginal hanya dijadikan objek politik dalam perhetalan pilkada dan pemilu dan dieksploitasi untuk mendulang suara oleh para kandidat politik dan bahkan hanya disemangatkan menjadi simbol-simbol pemilu (Wijarnarko, 2019). Melihat permasalahan tersebut penulis berupaya untuk menganalisa dengan melakukan penelitian terhadap pelibatan kelompok marjinal pada Pilkada Indramayu tahun 2020, penelitian ini merupakan studi kasus metode sosialisasi pemilu inklusif di Kabupaten Indramayu.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini tentunya memiliki tinjauan pustaka dan referensi ilmiah sebagai penunjang dan landasan dalam melakukan penelitian, ada beberapa teori terkait kelompok masyarakat marginal dan partisipasi pemilih yang menjadi rujukan penulis dalam melakukan penelitian ini, seperti yang dijelaskan (Fikri, 2017) membedakan marginal menjadi empat dimensi yakni (a) marginalitas sosial yang terpinggirkan secara sosial, (b) marginalisasi budaya, (c) marginalitas ekonomi, dan (d). marginalisasi politik. Masyarakat marginal adalah mereka (kelompok atau individu) yang lahir di dalam kota, yang tersisihkan dari pendidikan, kesehatan, memiliki taraf hidup yang rendah, serta akses mereka yang terbatas atau dibatasi oleh struktur yang ada. (Rosmalia, 2019) dalam tulisan yang berjudul jalan akhir, ajak golput kaum marginal yang merilis hasil temuan riset *founding father house* dan juga sindikasi pemilu demokrasi pada tahun 2019 tentang tingkat pengetahuan Pemilu 2019, dimana penelitian tersebut mengambil data pada Januari sampai dengan Maret 2019 terhadap 1.200 responden yang menunjukkan bahwa 94% pemilih sudah mengetahui adanya pelaksanaan pemilu, namun dari 94% itu hanya 57% yang dapat menyebutkan secara tepat tanggal pemungutan suara, selain itu juga hanya 7,42% responden mengetahui coblos ialah teknis penggunaan surat suara dan 37,5% mengetahui ada lima jenis warna yang digunakan, adapun pengetahuan terkait regulasi pemilu berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017, jumlah kursi DPR RI, serta jumlah dapil caleg RI masih di bawah 15%. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai pemilu masih sangat rendah, apalagi hal tersebut dihadapkan dengan kelompok masyarakat marginal yang minim pengetahuan dan akses kebijakan. Jika tidak dilakukan dengan pola inklusif kelompok tersebut akan sangat rentan alpa dalam menggunakan hak politik pada saat pemilu dan pilkada, maka melihat penjelasan tersebut penulis berupaya mengkaji lebih dalam terkait pelibatan kelompok masyarakat marginal dan partisipasi pemilih pada pilkada Indramayu tahun 2020 yang merupakan analisa studi kasus terkait pemilu inklusif di Kabupaten Indramayu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus seperti yang dijelaskan oleh crasweel (Raco, 2018) pendekatan studi kasus merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebagai solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Metode ini sangat relevan untuk meneliti fenomena, dinamika, pola dan metode sosialisasi pemilu pada pilkada Indramayu tahun 2020 dan pelibatan kelompok marginal dalam rangka membangun inklusifitas pemilu dan/atau pilkada di Kabupaten Indramayu. Adapun data yang diambil adalah data Partispasi politik masyarakat pada pelaksanaan pilkada Indramayu tahun 2020, yang selanjutnya data tersebut dihubungkan dengan program-program KPUD Kabupaten Indramayu dalam konteks sosialisasi dan program lainnya yang berhubungan dengan upaya peningkatan partisipasi pemilih, data

tersebut juga menjadi salah satu indikator sejauh mana keterlibatan kelompok marginal selama pelaksanaan pemilihan pilkada indramayu tahun 2020. Berikut adalah data partisipasi pemilih pada pilkada Indramayu dengan sebaran wilayah kecamatan dengan tingkat partisipasi dibawah 65%.

Tabel 1. Data partisipasi masyarakat pada pilkada indramayu tahun 2020

| No. | Nama Kecamatan | | | | |
|-----|----------------|--------|-----|--------|--------|
| 1 | Bangodua | 22.334 | 96 | 14.517 | 64,72% |
| 2 | Gantar | 42.490 | 395 | 27.626 | 64,42% |
| 3 | Kedokan bunder | 35.319 | 369 | 22.896 | 64,16% |
| 4 | Arahan | 25.770 | 240 | 16.579 | 63,74% |
| 5 | Kroya | 46.894 | 355 | 29.813 | 63,10% |
| 6 | Juntinyuat | 64.530 | 760 | 41.128 | 62,99% |
| 7 | Anjatan | 62.212 | 616 | 39.572 | 62,98% |
| 8 | Cantigi | 22.348 | 180 | 14.057 | 62,40% |
| 9 | Kertasemaya | 45.212 | 376 | 28.420 | 62,34% |
| 10 | Krangkeng | 50.071 | 328 | 31.361 | 62,23% |
| 11 | Kandanghaur | 65.645 | 450 | 41.021 | 62,06% |
| 12 | Haurgeulis | 61.546 | 714 | 38.521 | 61,87% |
| 13 | Tukdana | 41.759 | 290 | 25.760 | 61,26% |
| 14 | Patrol | 40.838 | 242 | 25.125 | 61,16% |

Sumber : Website KPUD Kabupaten Indramayu

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Melihat data partisipasi masyarakat pada pilkada Indramayu tahun 2020, menunjukkan bahwa ada sebanyak 14 kecamatan yang memiliki partisipasi kurang dari 65%, dengan sebaran 3 kecamatan mencapai 64%, 2 Kecamatan mencapai 63%, 7 kecamatan mencapai 63% dan 3 kecamatan hanya mencapai 61%, secara umum data partisipasi tersebut cukup signifikan akan tetapi kurang memenuhi target partisipasi pemilih yang di canangkan KPUD Indramayu sebesar 77,5 %, apalagi jika dibandingkan dengan data partisipasi pemilih pada pelaksanaan pilkada Indramayu tahun 2015 yang hanya mencapai sekitar 63 % serta data partisipasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2018 yang hanya sekitar 58,2 %. Hal ini menunjukkan pola sosialisasi, pendekatan dan kemitraan program pendidikan pemilih masih harus menjadi fokus yang serius dan terprogram secara berkelanjutan, karena tanpa adanya program strategis maka proses pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tidak akan ada peningkatan yang signifikan, karena kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam proses tahapan pemilu ataupun pemilihan merupakan salah satu indikator terbentuknya kesadaran politik masyarakat.

Diketahui bersama dalam trend demokrasi elektoral pelibatan seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok marginal merupakan hal yang sangat penting agar konversi hak politik melalui proses pemilu dapat terarah. Kelompok marginal adalah warga yang selama ini terpinggirkan dan tidak memiliki akses pada penentuan kebijakan pemerintah, kelompok marginal ini dapat dikategorikan seperti kelompok perempuan, warga miskin, dan kelompok difabel. Dalam konteks inklusifitas pemilu dan/atau pilkada keberadaan kelompok marginal harus dilibatkan secara strategis karena kelompok tersebut membutuhkan akselerasi program dan kebijakan pemerintah yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan kelompok marginal secara khusus, maka agar program-program dan kebijakan pemerintah tersebut dapat dikonversikan dengan baik dan tepat sasaran kepada kelompok marginal, perlu adanya pelibatan secara strategis oleh KPUD Indramayu, selain untuk memberikan akses politik terhadap kelompok marginal, juga dapat dijadikan sebagai mitra strategis pendidikan pemilih berkelanjutan, karena kelompok marginal merupakan kelompok masyarakat yang rentan akan kealfaan untuk menyalurkan hak politik dalam pilkada dan pemilu. Seperti yang (Dewi, 2015) yang meneliti terkait sikap dan pemaknaan perempuan

marginal terhadap politik uang: studi kasus pemilu tahun 2014 di Kabupaten Kudus, dimana kelompok marginal juga rentan terhadap sasaran politik uang, sehingga kemitraan yang dibangun dengan kelompok marginal harus kemitraan yang strategis bukan insidental pada saat akan menjelang pelaksanaan pemilu dan/atau pilkada, bentuk kemitraan harus dilakukan secara berkelanjutan, adapun program-program yang telah dilakukan KPUD Indramayu selama proses dan tahapan pilkada Indramayu tahun 2020 dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat masih belum inklusif, program tersebut masih terfokus pada pola penyerapan anggaran, adapun hasil penelitian terkait permasalahan tersebut antara lain :

1. Program Sosialisasi Pilkada Indramayu Tahun 2020 Kurang Inklusif

Sebagaimana yang ditulis (Ferdinan, 2020) pada media antaranews.com bahwa secara umum program sosialisasi KPUD Indramayu pada pelaksanaan pilkada Indramayu tahun 2020 merupakan adopsi dari program sosialisasi pemilu tahun 2019 yang menysasar 11 basis pemilih diantaranya pemilih keluarga, pemula, muda, perempuan, disabilitas, berkebutuhan khusus, kaum marjinal, komunitas, keagamaan, basis internet dan relawan demokrasi dengan target partisipasi 77,5% akan tetapi dalam pelaksanaan pilkada partisipasi pemilih hanya mencapai 66,1% walaupun tingkat partisipasi pada pilkada Indramayu tahun 2020 merupakan yang paling tinggi dari pilkada sebelumnya (pilkada tahun 2015) yang hanya mencapai 58,9%, hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi pemilih merupakan permasalahan yang harus mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak termasuk metode, pola sosialisasi dan juga pendekatan terhadap kelompok masyarakat yang diharapkan dapat mempertimbangkan aspek-aspek kewilayahan, latarbelakang ekonomi, latarbelakang pendidikan dan juga kultur di daerah daerah tertentu.

Selain itu juga melihat data hasil partisipasi pilkada Indramayu tahun 2020 yang hanya mencapai 66,6% dengan sebaran partisipasi masyarakat kurang dari 65% di 14 kecamatan mengindikasikan bahwa pengadopsian program sosialisasi pada pemilu 2019 belum sepenuhnya memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi pemilih pada pilkada Indramayu tahun 2020. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih pada pilkada Indramayu diantaranya (1). konstalasi Politik daerah yang berbeda dengan konstalasi politik nasional, (2). kandidat/peserta pemilu, (3). isu-isu demokrasi dan sectoral yang kurang menyentuh masyarakat bawah dan juga pola sosialisasi pemilu yang kurang terobosan, inovatif serta kurang inklusif. Walaupun Sebagian besar kegiatan sosialisasi pilkada yang dilakukan KPUD Indramayu cukup berhasil akan tetapi pelibatan kelompok-kelompok marginal kurang dilakukan, dalam hal ini kegiatan sosialisasi lebih banyak dilakukan bekerjasama dengan ormas, organisasi pemuda dan juga organisasi mahasiswa yang sudah memiliki kesadaran politik tinggi dari kelompok masyarakat lainnya, kegiatan tersebut belum berorientasi terhadap 11 basis pemilih yang didalamnya terdapat kelompok marginal, adapun sosialisasi pilkada inklusif tersebut hanya dilakukan di lapas seperti yang disampaikan (Dewi Nurmalasari, 2019) bahwa kelompok marginal yang menjadi sasaran sosialisasi adalah masyarakat binaan di lapas kelas II-B kabupaten Indramayu, sebagai upaya menghadirkan pemilu diseluruh lapisan masyarakat dan juga meningkatkan partisipasi pemilih. Kelompok marginal seharusnya dapat menjadi mitra strategis yang terlibat langsung dalam tahapan pemilu baik sebagai mitra sosialisasi. Keterlibatan kelompok masyarakat marginal tersebut akan memudahkan proses tahapan pemilu, karena kelompok tersebut yang memahami kondisi sosial didalamnya, sebagai contoh : sosilaisasi pemilu pada kelompok disabilitas diharapkan juga dilakukan tokoh atau perwakilan kelompok disabilitas, begitupun juga sosialisasi pemilu terhadap komunitas ojeg online, untuk mempermudah akses kepada komunitas tersebut, kegiatan sosialisasi juga diharapkan dapat dilakukan juga oleh tokoh atau perwakilan ojeg online yang memberikan sosialisasi kepada komunitasnya, karena yang memahami psikologi pemilih kelompok marginal adalah kelompok marginal itu sendiri, adapun tugas KPUD Kabupaten Indramayu dalam hal ini sebagai pendamping atau mentor program sosiliasasi tersebut, pola tersebut juga diakukan sebagai perluasan jaringan pemilih kepada kelompok kelompok tertentu supaya program sosialisasi dan penididkan pemilih dapat berkelanjutan.

2. Relawan Demokrasi RELASI

KPUD Kabupaten Indramayu telah melakukan perekrutan 55 relawan demokrasi pada pelaksanaan pilkada tahun 2020 untuk meningkatkan partisipasi pemilih, sesuai yang dijelaskan (Tarmizi, 2019) bahwa keberadaan relawan demokrasi di Kabupaten Indramayu untuk mendongkrak partisipasi pemilih, akan tetapi perekrutan relawan demokrasi tersebut kurang representatif sesuai dengan ketentuan dan sebaran basis pemilih strategis yang menjadi program prioritas KPUD Indramayu untuk mendongkrak partisipasi pemilih pada pilkada Indramayu tahun 2020. Sebagian besar masyarakat yang direkrut menjadi relawan demokrasi adalah para mahasiswa yang tergabung dari latarbelakang organisasi tertentu, kelompok ormas, organisasi kepemudaan dan juga perwakilan dari organisasi keagamaan. Relawan demokrasi cenderung aktif melakukan sosialisasi ke media sosial dan juga sektor-sektor pemerintahan seperti sekolah, pemerintah desa dan juga jaringan organisasi yang dimiliki, secara umum kelompok-kelompok tersebut memiliki pengaruh politik di masyarakat akan tetapi belum mampu menghadirkan pemilu di seluruh lapisan masyarakat dan cenderung abai untuk masuk kedalam kelompok-kelompok inklusif, hal tersebut juga menjadi salah satu faktor menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih di 14 kecamatan yang tidak mencapai angka 65%.

Selain itu juga kerja-kerja sosialisasi relawan demokrasi dalam tahapan pilkada Indramayu bukan hanya bertugas melakukan sosialisasi pemilu, akan tetapi juga harus dibekali untuk memberikan laporan terkait tantangan, hambatan dan cakupan pemahaman masyarakat secara keseluruhan terhadap tahapan, dalam hal ini laporan sosialisasi tersebut disertakan dengan memuat masalah-masalah di masyarakat sehingga temuan pada saat melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan relawan demokrasi menjadi rekomendasi dan acuan KPUD untuk memetakan wilayah-wilayah yang rawan dan juga berpotensi minim partisipasi agar menjadi perhatian dan menyelenggarakan intervensi kebijakan/program secara khusus, karena pembentukan relawan demokrasi seharusnya dapat menjadi jaringan strategis KPUD untuk melakukan pendidikan pemilih secara inklusif dan berkelanjutan di kelompok-kelompok marginal supaya sesuai dengan visi untuk membangun kesadaran politik masyarakat dan peningkatan partisipasi pemilih.

3. Pemanfaatan Data Partisipasi Pemilih Sebagai Indikator Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih.

Secara umum KPUD Kabupaten Indramayu memiliki data perolehan suara dan juga data tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan pemilu dan/atau pilkada dari tahun ke tahun, data tersebut diharapkan menjadi acuan program sosialisasi dan pendidikan pemilih di masyarakat, dimana desa dan/atau kecamatan yang memiliki kecenderungan partisipasi pemilih yang rendah dijadikan sasaran intervensi program sosialisasi dan pendidikan pemilih secara intensif, dengan tujuan agar partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pemilu dan/atau pilkada dapat meningkat secara signifikan. Data partisipasi pemilih juga dapat dijadikan sebagai indikator-indikator untuk melakukan pemetaan wilayah rendah partisipasi, menentukan materi, pola dan model sosialisasi yang akan dilaksanakan di basis-basis yang rendah tingkat partisipasinya. Selama ini data partisipasi pemilih tersebut kurang dimanfaatkan untuk melakukan pemetaan terhadap program sosialisasi dan pendidikan pemilih, data tersebut juga dapat menjadi acuan program relawan demokrasi sehingga kerja-kerja sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan relawan demokrasi juga dapat terfokus dan mengerucut ke basis-basis pemilih yang rendah partisipasi.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pilkada Kabupaten Indramayu tahun 2020 secara umum telah berjalan lancar sesuai dengan mekanisme tahapan yang diatur oleh undang-undang, akan tetapi rendahnya partisipasi pemilih dalam setiap pelaksanaan pilkada Indramayu harus menjadi perhatian khusus karena partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pemilu dan juga menjadi standar tingkat kesadaran politik masyarakat, walaupun tingkat partisipasi pada pelaksanaan pilkada Indramayu tahun 2020 mengalami

peningkatan di angka 66.6 % akan tetapi sebaran partisipasi di beberapa wilayah dibawah 65%, sekiranya terdapat sebanyak 14 kecamatan di Kabupaten Indramayu yang partisipasinya dibawah angka 65%. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa pengadopsian strategi pemilu pada pelaksanaan tahun 2019 kurang optimal. Faktor lainnya yang mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat adalah kurang dimanfaatkannya sebaran data partisipasi masyarakat dalam setiap momentum pemilu dan pilkada dari tahun ke tahun. Sebaran data partisipasi pemilih tersebut dapat digunakan sebagai indikator penyusunan program sosialisasi dan pendidikan pemilih supaya intervensi program peningkatan partisipasi pemilih dapat tepat sasaran dan memenuhi target.

Dengan adanya data partisipasi masyarakat tersebut, KPUD Indramayu dan relawan demokrasi dapat menasar wilayah-wilayah yang rendah partisipasi sebagai prioritas program sosialisasi dan pendidikan pemilih secara intens supaya target peningkatan partisipasi pemilih dapat terarah dengan baik. Keberadaan relawan demokrasi di Kabupaten Indramayu pada pelaksanaan pilkada tahun 2020 belum representative sesuai dengan 11 basis pemilih, relawan demokrasi masih didominasi mahasiswa, kelompok organisasi masyarakat, organisasi keagamaan dan juga organisasi kepemudaan, walaupun kelompok-kelompok tersebut memiliki pengaruh politik di masyarakat akan tetapi harus ada keterwakilan dari basis pemilih yang lain termasuk didalamnya adalah kelompok marginal, karena kelompok marginal merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap kealfaan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada, kurangnya akses terhadap pelibatan dalam tahapan pemilu dan pilkada juga menjadi salah satu faktor terhambatnya penyaluran hak-hak politik kelompok masyarakat marginal.

Sebagai upaya menciptakan pemilu yang inklusif diharapkan kelompok masyarakat marginal menjadi mitra strategis dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih baik sebagai mitra, relawan demokrasi dan atau menjadi penyelenggara pemilu, saat ini pelibatan kelompok masyarakat marginal baru dalam konteks peserta sosialisasi pemilu bukan menjadi subjek dan mitra strategis, adapun kelompok marginal yang menjadi sasaran sosialisasi adalah masyarakat binaan di dalam lapas kelas II-B Indramayu padahal secara umum masih banyak kelompok marginal lainnya seperti kelompok disabilitas, kelompok nelayan, petani, kelompok perempuan dan juga kelompok budaya ataupun penghayat keyakinan, keterbatasan pelibatan kelompok masyarakat marginal tersebut yang menjadi salah satu faktor proses tahapan pilkada belum tersosialisasikan ke tingkatan masyarakat bawah secara inklusif yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan pilkada Indramayu tahun 2020..

REFERENSI

- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329.
<https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Dewi nurmala sari. (2019, December). Kelompok Marjinal Jadi Sasaran Sosialisasi KPU Indramayu. Retrieved from suryagrageonline.com website:
<https://suryagrageonline.com/kelompok-marjinal-jadi-sasaran-sosialisasi-kpu-indramayu/>
- Dewi, S. M. (2015). Sikap Dan Pemaknaan Perempuan Marginal Terhadap Politik Uang: Studi Kasus Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Kudus. *Addin*, 9(1), 205–228.
- Ferdinan, Y. (2020). KPU Indramayu adopsi sosialisasi Pemilu 2019 untuk capai target partisipasi. Retrieved from Antara News.com website:
<https://jabar.antarane.ws.com/berita/217148/kpu-indramayu-adopsi-sosialisasi-pemilu-2019-untuk-capai-target-partisipasi>
- Fikri, S. (2017). Marjinalisasi Masyarakat Miskin Atas Hak Kesehatan di Kota Surabaya. *Repository Universitas Airlangga*, 2–3.
- Jayus. (2013). Rekonseptualisasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10(2).
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*.

- <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Rosmalia, P. (2019). Jalan Akhir, Ajak Golput Pilih Kaum Marginal.
- Subekti, T. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Studi Turn dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013). *Media Neliti*, 1, 16.
- Tarmizi, T. (2019). KPU Indramayu: Keberadaan relawan demokrasi untuk tingkatkan partisipasi. Retrieved from Antara News.com website: <https://www.antaraneews.com/berita/787889/kpu-indramayu-keberadaan-relawan-demokrasi-untuk-tingkatkan-partisipasi>
- UU No 7 tahun 2017*. (2017). 1-283.
- Wijarnarko, T. (2019). Kelompok Masyarakat Marginal Dinilai Apatis terhadap Pemilu. Retrieved from Tempo.co website: <https://pemilu.tempo.co/read/1176478/kelompok-masyarakat-marginal-dinilai-apatiss-terhadap-pemilu>